

## ABSTRAK

Kendaraan bermotor telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas termasuk dalam pekerjaannya. Klausul baku yang dibuat oleh pelaku usaha pembiayaan kendaraan bermotor memuat klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen (klausul eksonerasi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur eksekusi barang jaminan pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor sudah sejalan dengan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman bagi pembaca bagaimana kedudukan hukum pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal kendaraan bermotor serta prosedur eksekusi jaminan yang sesuai dengan perundang-undangan dan asas-asas hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha sewa beli masih menggunakan klausul baku serta klausul eksonerasi yang tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian, serta masih terlihat banyaknya celah yang menimbulkan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan eksekusi jaminan dengan cara yang tidak sejalan dengan undang-undang.

**Kata kunci: Pembiayaan Konsumen, Klausul Baku, Klausul Eksonerasi, Eksekusi Jaminan, Wanprestasi, Fidusia, Kredit.**

## **ABSTRACT**

Motor vehicles have become a necessity for people in a variety of activities included in the work. Standard clause made by the businesses contains clauses that shift responsibility to consumers or businesses referred to the exoneration clause.

This study aims to determine whether the execution procedure collateral on a consumer finance agreement is fit with the laws and principles of law applicable in Indonesia. This study aims to provide insight to the reader how the legal position of businesses and consumers in a consumer finance agreement as well as the motor vehicle warranty execution procedures in accordance with the laws and principles of law in Indonesia. The method used is the normative juridical efforts to seek solutions to problems by researching and reviewing the norms of positive law to do library research.

These results indicate that the consumer finance businesses are still using a standard clause as well as the exoneration clause which is not in accordance with the law principles of contract, and it still looks the many gaps that lead to the opportunity for businesses to execute the warranty using unfair method.

**Keywords: Consumer Finance, Standard Contract, Exoneration clause, Collateral Execution, Breach of contract, Fiduciary, Credit.**